

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) ERA COVID 19 DI DESA LATELLANG KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE

A.Wahdaniah^{1*}, Budi Setiawati², Muhammad Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to find out the implementation of PKH in the Latellang Village community, Patimpeng District, Bone Regency. This study used qualitative methods and the data sources used observations, interviews, and other data sources as secondary data sources. Data processing and analysis technology had gone through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion making. The results of this study were 1) the communication aspect of all administrators in Latellang Village using communication by holding a meeting once a month to maintain communication between the management and beneficiaries, 2) the resource aspect of PKH assistants who did not understand the meaning and adjustment of PKH was so that the delivery of information to participants receiving the assistance had not been maximized, 3) aspects of the bureaucratic structure of procedures or rules that had been in effect with PKH had been followed and obeyed by participants and managers of this program.

Keywords: *implementation, pkh, poverty alleviation*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan PKH pada masyarakat Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan adapun sumber data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, dan sumber data lainnya secara sumber data sekunder. Teknologi pengolahan dan analisis data telah melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini pada 1) aspek komunikasi seluruh pengurus yang ada di Desa Latellang memanfaatkan komunikasi dengan cara mengadakan rapat setiap sebulan sekali untuk menjaga komunikasi antar pengurus dan penerima bantuan tetap terjaga, 2) aspek sumber daya adanya pendamping PKH yang belum memahami makna dan penyesuaian dari PKH ini sehingga dalam penyampaian informasi kepada peserta penerima bantuan tersebut belum maksimal, 3) aspek struktur birokrasi prosedur atau aturan yang telah berlaku dengan PKH telah di ikuti serta di patuhi oleh peserta dan pengelola program ini.

Kata kunci: implementasi, pkh, pengetasan kemiskinan

* awahdaniah@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu masalah sosial yang bersifat mendunia. Sehingga kemiskinan dapat di artikan sebagai masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam masalah ini pemerintah sangat berperan penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia kesejahteraan bukan lagi hal yang baru karena kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga menegaskan bahwa kesejahteraan sosial ialah suatu institusi atau bidang yang dimana melibatkan aktivitas terorganisir yang dilakukan dengan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta guna untuk mencegah, mengatasi atau memberi kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok serta masyarakat.

Permasalahan kemiskinan muncul karena ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang mana di ketahui bahwa Indonesia

merupakan Negara berkembang dan memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan upaya pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan sudah banyak di dukung oleh aturan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam hal ini adapun upaya yang di lakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menyalurkan bantuan PKH.

PKH merupakan salah satu *program Conditional Cash Transfer (CCT)* yang dimana telah di kenal di seluruh dunia dalam menanggulangi kemiskinan yang sangat memprihatinkan sebagai bentuk penanggulangan masalah sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang di berikan kepada keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan PKH. Selain itu sebagai bantuan program bantuan sosial bersyarat, PKH ini memberikan akses keluarga miskin yang mendapatkan

bantuan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik). Sehingga PKH dapat memberikan manfaat agar dapat membantu penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita presiden RI sehingga PKH memberikan akses pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampungan termasuk akses terhadap sebagai program perlindungan sosial yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

Tahun 2020 merupakan tahun dimana seluruh Negara termasuk Indonesia terkena dampak virus Corona, yang bermula dari kota Wuhan Cina. Yang dimana semakin hari semakin banyak memakan korban, sehingga wabah Covid 19 menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia khususnya di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Sehingga muncul berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat yang dimana tidak dapat di pungkiri bahwa Covid 19 hampir melumpuhkan kondisi perekonomian masyarakat.

Adapun masalah sosial dan perekonomian yang terjadi akibat adanya Covid 19 yaitu : (1) Kelangkaan

barang, (2) Disorganisasi dan difungsi social, (3) Tindakan kriminal, (4) Angka kemiskinan dan pengangguran meningkat, (5) Kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

Selain permasalahan di atas adapun permasalahan lain yang berkaitan dengan pandemi ini adalah masalah kesehatan. Bagi masyarakat pelosok atau pedesaan, pola hidup bersih sering kali ia abaikan dikarenakan mereka lebih fokus untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Sehingga di tengah pandemi Covid-19 perputaran ekonomi yang menurun menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia khususnya di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Angka kemiskinan di tahun 2020 mengalami kenaikan di bandingkan pada tahun 2019. Jumlah penduduk Kabupaten Bone berdasarkan data sensus penduduk 2020 berjumlah 801.755 jiwa. Ada sedikit kenaikan angka kemiskinan di tahun 2019 persentase kemiskinan di Bone 10,06% sedangkan pada tahun 2020 mencapai 10,68% atau 81 ribu jiwa, yang mana kenaikannya mencapai 0,62%. Naiknya angka kemiskinan karena pandemi Covid-19, banyaknya sektor usaha yang sangat terdampak dimana salah satunya adalah karyawan yang di rumahkan.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Sosial, Kabupaten Bone menyalurkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat yang kurang mampu. Penyaluran kartu ini sudah dilakukan mulai hari senin, (27/10) yang berada di kecamatan Mare, Tonra, Salomekko, Kahu, Kajuara, Bontocani, Libureng dan patimpeng. Sementara pada hari selasa, (28/01) pendistribusian kartu PKH juga dilakukan di Kecamatan Awangpone, Cenrana, Ajangale, Duaboccoe, Tellusettinge. Selain itu pada hari rabu, (29/01) penyerahan kartu PKH dilanjutkan di Kecamatan Palakka, Cina, Sibulue, Barebbo dan ponre. Dan pada hari kamis dilakukan di Kecamatan Ulaweng, Lapri, Lamuru dan Bengo. Untuk hari jumaat di Kecamatan Riattang, Tanete Riattang Timur dan Tanete Riattang Barat.

Pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Bone berencana akan memasang tulisan di setiap rumah-rumah warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bertuliskan “Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bone. Dengan adanya program tersebut dapat memudahkan pemerintah untuk mengetahui rumah

mana saja yang layak dan telah menerima bantuan tersebut. Karena tidak dapat di pungkiri bahwa penerima bantuan PKH sudah ada yang tidak layak lagi sebagai penerima bantuan lagi tetapi tetap menerima bantuan. Anggota Komisi IV DPRD Bone, Rangga Risal mengungkapkan bahwa penyaluran untuk memastikan agar bantuan PKH tepat sasaran, selain itu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bantuan tersebut dapat di manfaatkan dengan baik.

Jumlah dana yang di bagikan melalui PKH ini di sesuaikan dengan keadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Indeks dan faktor penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021 yaitu : (1) Ibu hamil dan anak usia dini 0 s.d 6 tahun sebesar Rp. 3.000.000, (2) Pendidikan anak SD sebesar Rp. 900.000, (3) Pendidikan anak SMP sebesar Rp. 1.500.000, (4) Pendidikan anak SMA sebesar Rp. 2.000.000 serta Penyandang disabilitas dan Lanjut usia sebesar Rp. 2.400.000.

Bantuan komponen di berikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Keluarga penerima manfaat PKH khusus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada tahun 2019-

2021 di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng yaitu pada tahun 2019 jumlah yang menerima sebanyak 56 KPM, pada tahun 2020 jumlah yang menerima sebanyak 55 KPM dan pada tahun 2021 jumlah yang menerima bantuan sebanyak 61 KPM.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap implementasi menentukan apakah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar dapat diterapkan di lapangan, dan berhasil menghasilkan output dan hasil sesuai rencana. Untuk mencapai keluaran dan hasil tertentu, kebijakan publik perlu dilaksanakan. Jika tidak diterapkan, kebijakan tersebut hanya akan menjadi rekor elit yang ditekankan Udogi di Time(Sasmito, Cahyo, 2019).

Menurut George Edward III (Winarno, 2008) berpendapat bahwa implementasi sangat penting bagi administrasi public dan kebijakan publik. Implementasi adalah tahap kebijakan antara pembentukan rencana kebijakan dan konsekuensi kebijakan dari mereka yang mempenaruhinya. Jika sebuah rencana tidak dapat mengurangi masalah sebagai tujuan kebijakan, maka rencana tersebut mungkin gagal meskipun dilaksanakan dengan baik dan rencana yang baik

mungkin gagal bila program tersebut kurang di implementasikan dengan baik.

Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2016:126) mendefenisikan bahwa implementasi kebijakan public merupakan sebagai tindakan dalam mengambil keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut meliputi upaya untuk mengbah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, dan dalam konteks upaya terus menerus agar mencapai perubahan yang besar yang dimana harus di tentukan oleh organisasi public untuk mrncapai tujuan yang telah di tetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagai mana di kutip dalam buku Solhin Abdul Wahab (2008:65) mengatakan bahwa implementasi adalah memahami bahwa apa yang sebenarnya terjadi setelah rencana efektif atau yang di rumuskan adalah focus implementasi kebijakan, yaitu peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah di setujuinya pedoman kebijakan nasional, termasuk upaya pengelolaannya dan realisasinya kepada pemerintah, masyarakat ataupun dampak dari peristira tersebut.

Edwards III (1980:1) berpendapat bahwa keempat faktor implementasi yakni: *Communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition or attitudes* (disposisi atau sikap) dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi) di pandang esensial oleh setiap implementor dalam melaksanakan kebijakan publik, yang dimana keempat factor tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang dimana dapat di artikan bahwa apabila satu factor tidak ada maka ketiga factor yang lainnya tidak berpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan public.

Berbagai model dan teori oleh para pakar telah dikembangkan untuk pembahasan tentang implementasi kebijakan Negara baik yang bersifat abstrak maupun yang relatif operasional tergantung pada kompleksitas permasalahan yang akan dikaji. Sebagai pedoman bahwa semakin kompleks permasalahan kebijakan maka semakin mendalam analisis yang dilaksanakan dan semakin diperlakukan model atau teori yang sanggup menjelaskan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara variabel-variabel yang dipilih untuk dijadikan fokus analisis. Untuk menganalisis suatu proses implementasi kebijakan itu berlangsung, dapat dilihat

dari berbagai model implementasi kebijakan

Adapun model yang di tunjukkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Horn (dalam Subarso, 2005: 99), menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan dengan lancar dari kebijakan public, implementor, dan kinerja kebijakan public”. Adapun variabel yang menjadi penunjang dalam kebijakan public yaitu: (a) Karakteristik agen pelaksana atau implementor, (b) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, (c) Kecenderungan pelaksana atau implementor. Implementasi kebijakan di gunakan untuk mencapai kinerja yang tinggi serta berlangsung dalam antar hubungan berbagai factor. Van Metter dan Van Horn memberikan penjelasan bahwa sebuah proses implementasi kebijakan adalah suatu performansi atau abstraksi yang pada dasarnya secara sengaja dilaksanakan untuk mencapaisuatu kinerja implmentasi dan dipengaruhi oleh enam (6) variabel, yaitu: sikap dan kecenderungan para pelaksana, ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (dalam Nugroho, 2006:131) bahwa untuk melaksanakan

implementasi kebijakan di butuhkan beberapa syarat, antara lain: (a) Berhubungan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang di hadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. (b) Apakah untuk melakukannya terdapat sumber daya yang mendukung termasuk sumber daya waktu, (c) Apakah gabungan dari sumber-sumber yang di butuhkan memang benar ada, (d) Apakah kebijakan yang akan segera di implementasikan di dasari hubungan yang andal, (e) Seberapa banyak kualitas yang terjadi.

Model implementasi kebijakan Soren C. Winter. Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri. Selanjutnya Winter mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni: 1) Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah: komitmen dan koordinasi antar organisasi; 2) Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma

profesional; 3) Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

Program Keluarga Harapan adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program keluarga harapan berada dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik pusat maupun daerah.

Program Keluarga Harapan merupakan program lintas kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya

yaitu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik. (Adrianto, 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis pendekatan kualitatif deskriptif . penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan pandangan masyarakat. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, gagasan atau pendapat masyarakat mengenai masalah yang akan di teliti, akan tetapi penelitian ini tidak dapat di ukur dengan angka-angka. Kemudian di gunakan teknik deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Adapun tipe penelitian yang di gunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini di gunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu masalah yang akan di teliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara terstruktur. Tipe

deskriptif di dasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian, kemudian menguraikan dan membandingkan kenyataan yang ada kemudian menarik kesimpulan. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik ini digunakan karena pemilihan informan berdasarkan tujuan dari penelitian. Informan yang dipilih dianggap dapat mewakili dan banyak mengetahui mengenai objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulandata dilakukan melalui 3 cara yaitu :pertama teknikwawancara, kedua teknik observasi/pengamatan langsung, ketigateknik dokumentasi, sedangkan teknik pengabsahandata terdiri dari: triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data sebagaiberikut: (1) Pengumpulan Data Melalui Wawancara, Wawancara yang di lakukan terhadap sumber informasi yang dapat memberikan informasi yang akurat terhadap studi kasus penelitian, (2) Reduksi data, Banyaknya jumlah data yang di peroleh dari data lapangan mengharuskan peneliti untuk mencatat lebih detail dan terperinci, untuk mendapatkan data yang lebih detail memetlukan reduksi data, (3) Uji *Confirmability*, Adapun arti dari uji confirmability yaitu menguji hasil

penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang telah di lakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang di lakukan maka penelitian tersebut telah masuh standar confirmability, (4) Penarikan kesimpulan, di lakukan dengan mencari arti pola-pola penjelasan. Sehingga dilakukan dengan teliti dan cermat dengan melakukan beberapa tinjauan ulang pada catatan lapangan sehingga data-data yang di peroleh akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) telah di laksanakan di Indonesia sejak tahun 2007, rencana tersebut merupakan produk kebijakan kementerian sosial yang bertujuan untuk mengatasi atau menanggulangi masalah kemiskinan. Adapun pada tahun pertama pelaksanaan PKH yang menjadi daerah percobaan adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Gorontalo. Program Keluarga Harapan (PKH) di laksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 20013, termasuk di Kabupaten Bone, dan pada tahun 2016 di Kecamatan Patimpeng tepatnya di Desa Latellang Kabupaten Bone. Adapun tugas pokok kantor kecamatan Patimpeng adalah membangun dan

memajukan kehidupan masyarakat termasuk Desa Latellang.

Adapu Jumlah penduduk desa latellang pada tahun 2020 (sumber data) 1.538 jiwa. Yang dimana laki-laki 747 jiwa (49%) sedangkan perempuan 791 jiwa (51%). Seluruh penduduk desa latellang terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 321 kepala keluarga (KK) yang dimana rata-rata jumlah anggota keluarga sebanya 3 sampai 4 jiwa. Mata pencaharian masyarakat Desa Latellang yang dominan yaitu petani, berkebun dan sebagian kecil PNS, TNI, POLRI serta pengusaha. Sehingga jumlah KPM yang terdapat di Kabupaten Bone Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone pada tahun 2021 yaitu 61 keluarga .Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Patimpeng, terdapat seorang personel dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) yaitu pendamping PKH. Kehadiran pendamping dibutuhkan guna membantu peserta PKH dalam memperoleh hak yang selayaknya mereka terima dari PKH. Selain untuk kepentingan peserta, pendamping memiliki tugas pokok antara lain validasi, pertemuan bulanan dan verifikasi. Tugas pokok ini membantu dalam mendeteksi segala permasalahan

dan melakukan tindak lanjut dalam kurun waktu yang cepat dan tepat.

Oleh karena itu Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone masih ada yang belum tepat sasaran di karenakan masih menggunakan data lama dalam menentukan penerimaan program ini Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut akan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan orientasi utama PKH dimana memberikan kantuan kepada Rumah Tangga Penerima Manfaat (KPM)

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai tujuan yang ditetapkan oleh kementrian sosial yaitu Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan balita serata anak yang berusia 5-7 tahun yang dimana belum masuk sekolah dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun penyesuaian dari program PKH ialah meningkatkan status kesehatan KPM. Dengan program ini keluarga yang menerima bantuan di harapkan memiliki kesehatan yang baik seperti kesehatan untuk ibu hamil, ibu nifas, anak balita serta anak yang berusia 5-7 tahun yang belum terdaftar di sekolah,

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Edward III di mana terdapat 3 indikator antara lain yaitu Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi dalam PKH, sehingga di jabarkan ailah sebagai berikut:

Komunikasi

Sangat berperan penting dalam menentukan berhasil tidaknya tujuan PKH di Desa Latellang. Ketika mengambil keputusan tentu saja mereka sudah tau apa yang akan di lakukan, implementasi yang efektif akan terjadi, apabila komunikasi berjalan dengan baik. Maka ilmu yang akan mereka pelajari dapat berperan dengan baik. Pelaksanaan rencana harus di komunikasikan dengan baik kepada pihak yang terlibat di dalamnya. Selain itu, kebijakan yang di komunikasikan harus akurat serta konsisten. Komunikasi di perlukan agar pembuat kebijakan dan pelaksana rencana lebih konsisten dalam mengimplementasikan setiap rencana yang akan di terapkan pada tujuan perencanaan, komunikasi dangat penting dalam pelaksanaan. Ketika meneruskan pesan dalam suatu organisasi atau dari organisasi satu ke organisasi lain, komunikator dapat menyebarkannya dengan sengaja atau tidak sengaja. Selain itu, jika sumber informasi yang berbeda memberikan

penjelasan yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam upaya mencapai tujuan kebijakan.

Sumber Daya

Dalam suatu kebijakan mungkin tujuan yang di tetapkan sudah jelas dan logis, akan tetapi bukan hanya factor tersebut yang dapat mempengaruhi dalam proses pengimplementasian suatu program. Akan tetapi faktor sumber daya juga memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam menjalankan sebuah program merupakan salah satu factor yang perlu di perhatikan. Oleh karena itu sumber daya yang di maksud ialah sumber daya manusia, sumber daya finansial serta sumber daya waktu yang diman untuk mendukung jalannya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Indikator sumber daya memiliki beberapa elemen yakni: (1) Sumber daya manusia, adapun sumber daya yang utama dalam upaya mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sumber daya manusia yang dimana sumber daya yang dimaksud ialah staf. Ketidak berhasilan dalam implementasi kebijakan salah satunya di sebabkan

oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak memiliki keahlian di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saj tidak mencukupi, akan tetapi diperlukan syaf yang cukup dan memiliki kemampuan yang sesuai di bidangnya untuk menjalankan program tersebut dan (2) Sumber daya finansial Yang menjadi faktor utama dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program adalah sumber daya finansial, yang dimana terkadang suatu program memerlukan budget yang cukup untuk menghasilkan program yang berkualitas.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Adapun yang di maksud dengan struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu kadang kala dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat tanggung jawab antara beberapa unit pelaksana oleh karena itu di butuhkan koordinasi agar dapat mengontrol suatu implementasi. (a) SOP (Standar Operasi Procedur) ialah Pelaksanaan suatu program juga

mebutuhkan satu prosedur yang menjadi dasar atau standar pelaksanaannya, (b) Fragmentasi ailah Dalam pelaksana suatu program, terkadang penyebaran tanggung jawab di antara beberapa unit kerja ataupun instansi. Oleh karena itu perlu adanya di butuhkan koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam program ini. Sehingga program PKH di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone melibatkan beberapa pihak yang berhubungan di antaranya dari Pihak kecamatan, Korkab PKH, Pendamping PKH, Kepala Desa, serta Masyarakat.

KESIMPULAN

Faktor pendorong komunikasi dalam PKH sangat berpengaruh atau berperang penting terhadap berlangsungnya program tersebut dimana, komunikasi di perlukan agar pembuat kebijakan serta pelaksanaan rencana lebih konsisten dalam mengimplementasikan setiap rencana yang akan di terapkan pada tujuan perencanaan, komunikasi sangat penting dalam pelaksanaan dimana komunikasi sebelum dan sesudah korona di Desa Latellang sangat berpengaruh karena banyaknya isu-isu yang tidak kongkrik yang bias saja memberikan pengaruh yang tidak baik

untuk peserta penerima bantuan PKH ini. Sehingga seluruh pengurus yang ada di Desa Latellang memanfaatkan komunikasi dengan cara mengadakan rapat setiap sebulan sekali untuk menjaga komunikasi antar pengurus dan penerima bantuan tetap terjaga, Sumber daya finansial serta sumber daya waktu yang dimana agar berjalannya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) adanya pendamping PKH yang belum mengerti atau memahami betul tentang makna dan penyesuaian dari PKH ini sehingga dalam penyampaian informasi kepada peserta penerima bantuan tersebut belum maksimal serta insentif atau gaji pendamping PKH memang seharusnya perlu di tambah sebab untuk menjangkau dusun-dusun yang terdapat di Desa Latellang cukup membutuhkan perjuangan yang dimna masih terdapat jalanan yang belum teraspal dan masih terdapat jalanan bebatuan untuk sampai di lokasi, Struktur birokrasi berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik prosedur atau aturan yang telah berlaku dengan PKH telah di ikuti serta di patuhi oleh peserta dan pengelola program ini serta bahwa masih terdapat masalah dalam koordinasi dengan peserta penerima

bantuan yang di karenakan oleh kondisi jalan yang rusak serta jaringan komunikasi telepon yang kurang menunjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto. (2017). *Kotribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu Pada Masyarakat Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Antriya Eka Suwinta, I. P. (2016). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. *Kajian Kebijakan Publik*, 1(1), 1–11.
- B.S.Tlonaen, Yudid, Williy Tri Hardianto, C. D. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 29–37.
- Dedy Utomo, Abdul Hakim, H. R. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 29–34.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (N. F. Atif (Ed.)). PT Refika Aditama.
- Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Al-Bayan*, 20(29), 45–58.
- Kajian Program Keluarga Harapan*. (2015). Direktorat Jenderal Kementrian Keuangan.
- Muhammad Daud, Y. M. (2018). *Jurnal Humaniora*. *Jurnal Humaniora*, 2(1), 29–38.
- Purwanto, S. A., Sumartono, & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana*, 16(2), 79–96.
- Sasmito, Cahyo, E. R. N. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68–74.
- Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 14(4), 25–42.